

DIPLOMASI PUBLIK JEPANG DALAM MENGHADAPI KRITIK TIONGKOK & KOREA SELATAN ATAS PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR KE LAUT PASIFIK

Muhammad Naufal Rizan Bahari¹ Try Danuwijaya² Nurinaya³

¹ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email Korespondensi: naufalbahari46@gmail.com

Abstract

Japan's dumping of nuclear waste from the Fukushima nuclear power plant into the Pacific a triggered criticism from China and South Korea for threatening the environment and regional health. In response, Japan implemented a public diplomacy strategy to manage international perceptions and maintain the legitimacy of its policies. This article analyzes the strategy using Mark Leonard's public diplomacy model that includes three stages: News Management, Strategic Communication and Relationship Building. Through a qualitative and case study approach, the research found that Japan relied on scientific transparency, cooperation with the IAEA, and global and digital media communication as diplomatic tools.

Keywords: Public diplomacy, Japan, China, South Korea, Nuclear Waste, Pacific Ocean

Abstrak

Pembuangan limbah nuklir Jepang dari PLTN Fukushima ke Laut Pasifik memicu kecaman dari Tiongkok dan Korea Selatan karena mengancam lingkungan dan kesehatan regional. Menanggapi hal tersebut, Jepang menerapkan strategi diplomasi publik untuk mengelola persepsi internasional dan mempertahankan legitimasi kebijakannya. Artikel ini menganalisis strategi tersebut dengan menggunakan model diplomasi publik Mark Leonard yang mencakup tiga tahap: Manajemen Pemberitaan, Komunikasi Strategis, dan Pembangunan Hubungan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa Jepang mengandalkan transparansi ilmiah, kerja sama dengan IAEA, dan komunikasi media global dan digital sebagai alat diplomasi.

Kata Kunci: Diplomasi Publik, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Limbah Nuklir, Laut

Pendahuluan

Sejak berabad-abad silam, laut sudah menjadi sumber kehidupan masyarakat di kawasan Asia Timur. Negara besar seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan memiliki sejarah yang panjang terkait perkembangan sektor maritim mereka yang mana lautan bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi juga sumber kehidupan, identitas budaya, dan pendorong ekonomi di Asia Timur. Namun, kemajuan zaman membuat laut menjadi semakin mengkhawatirkan, ancaman seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, pemanasan global, dan pembuangan limbah industri, termasuk limbah nuklir. Pembuangan limbah radioaktif ke laut, meskipun dengan prosedur teknis tertentu, menimbulkan kekhawatiran yang meluas mengenai dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia, keanekaragaman hayati laut, dan kelestarian lingkungan.

Bencana nuklir *Fukushima Daiichi* yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 lalu yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami melumpuhkan Jepang dan membuat Jepang mengalami kerugian yang berlangsung selama bertahun-tahun setelahnya. Salah satunya adalah Jepang harus melakukan prosedur panjang terkait pengolahan limbah radioaktif. Prosedur pengolahan limbah nuklir ini dilakukan untuk “mensterilkan” sisa-sisa limbah radioaktif agar dapat dibuang dengan tidak merusak ekosistem di Jepang. Prosedur ini dinamakan ALPS atau *Advanced Liquid Processing System* yang dicanangkan secara resmi oleh pemerintah Jepang pada tahun 2021 silam dan resmi dilaksanakan prosedurnya secara bertahap oleh pemerintah Jepang sejak tahun 2023 lalu (McCurry, 2021a).

Dalam prosesnya, ALPS direncanakan sebagai bagian dari proses pengolahan limbah radioaktif dari reaktor nuklir PLTN Fukushima dan selanjutnya dibuang langsung menuju ke Samudera Pasifik. Pembuangan limbah ke laut oleh Jepang ini dilakukan karena fasilitas penyimpanan limbah radioaktif di PLTN Fukushima telah “*overload*” dan harus segera dibuang agar tidak menimbulkan resiko yang lebih besar di kemudian hari.(Fukushima Update, 2021). ALPS berfungsi untuk mengurangi sebagian besar kadar isotop tritium yang merupakan senyawa radioaktif dari air hasil pengolahan agar berada dibawah ambang batas yang ditetapkan. Jepang mengklaim bahwa ALPS akan mengurangi kadar isotop dalam air limbah dan menjadikannya aman untuk dibuang ke laut. Klaim ini dikuatkan dengan pernyataan resmi *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang menyatakan bahwa kadar tritium dalam air hasil pengolahan yang akan dilepaskan oleh Jepang jauh di bawah ambang batas yang

ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan standar internasional lainnya, sehingga dampak radiologisnya diperkirakan dapat diabaikan.(IAEA, 2023) Selain itu, pembuangan air limbah radioaktif yang telah diolah ke laut merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh banyak negara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, selama memenuhi persyaratan keselamatan dan pemantauan lingkungan yang ketat.

Rencana ini menimbulkan kontroversi global dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat Jepang dan negara tetangga seperti Korea Selatan dan Tiongkok. Kekhawatiran ini tak lepas dari potensi kerusakan ekologis di Laut Pasifik dalam waktu yang lama. Rencana ini juga ditakutkan akan mematikan mata pencaharian masyarakat yang menaruh nasib mereka pada kekayaan sumber daya di laut, yang mana bisa menimbulkan masalah sosial ekonomi yang jauh lebih besar di kawasan Asia Timur.(Liang et al., 2024). Berbagai lontaran kritik dan penolakan secara masif disampaikan dari berbagai penjuru dunia, baik organisasi lingkungan internasional seperti *Greenpeace* hingga ke negara-negara di kawasan Samudera Pasifik, tak terkecuali dari negara terdekat dengan Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok.(Ryall, 2020). Masyarakat Tiongkok menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi pencemaran perairan dan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut serta kesehatan manusia. Pemerintah Tiongkok bahkan langsung mengambil kebijakan dengan memberlakukan larangan impor secara total terhadap hasil produk laut dari Jepang sebagai langkah pencegahan.(CNN Indonesia, 2023). Tiongkok melalui Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Wang Wenbing merespons keras kebijakan Jepang dalam membuang limbah nuklir dari PLTN Fukushima ke laut, dengan menyampaikan kritik tajam yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan dimensi etika dan kemanusiaan. Pemerintah Tiongkok menilai keputusan Jepang sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab karena dilakukan secara sepihak tanpa melalui konsultasi internasional yang menyeluruh, terutama dengan negara-negara yang secara geografis dekat dan berpotensi terdampak langsung (Zakiah, 2023).

Respon serupa diperlihatkan oleh masyarakat Korea Selatan yang melakukan protes di berbagai penjuru negeri dan menggaungkan bahwa rencana Jepang dalam melakukanpembuang limbah radioaktif ke laut merupakan perilaku tidak bertanggung jawab.(Hyun-woo, 2023). Pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas namun tetap berhati-hati terhadap kebijakan ini, melalui Yoo Guk-hee, Ketua Komisi

Keamanan dan Keselamatan Nuklir Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan akan melakukan inspeksi mendalam untuk melihat dan mengonfirmasi prosedural yang dilakukan oleh Jepang sudah aman dan sesuai dengan tanggung jawab lingkungan. (Maresca, 2023). Inspeksi ini akan dilakukan oleh para ahli dan akademisi Korea Selatan untuk mengawasi fasilitas dan prosedural ALPS serta membuktikan klaim IAEA dan pemerintah Jepang terkait pembuangan limbah nuklir sudah aman dan sesuai standar internasional yang berlaku. (Han Joo, 2023).

Dalam menghadapi gelombang reaksi kritisi ini, Jepang secara cepat mengambil langkah solutif dengan melakukan pemingkakan narasi positif dengan selalu melandaskan apa yang sedang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan standar prosedural yang diakui secara internasional. Jepang berupaya melakukan pendekatan secara diplomatis dan bisa diterima secara luas oleh public internasional, mengingat reaksi keras ini menunjukkan bahwa persoalan pembuangan limbah nuklir Jepang tidak hanya berakar pada isu teknis atau ilmiah, tetapi juga pada dinamika politik kawasan, sejarah kolonialisme, ketegangan diplomatik, dan persepsi publik yang sensitif terhadap isu lingkungan dan nuklir. (Azizah et al., 2024). Dalam konteks ini, diplomasi publik menjadi pendekatan yang paling tepat dalam merespons kritik dan membentuk opini positif di publik secara global. Diplomasi publik tidak hanya bertujuan menjangkau pemerintah asing, melainkan juga publik internasional secara menyeluruh melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media, institusi ilmiah, serta kerja sama multilateral. Jepang berupaya membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab dan transparan dengan membuka akses informasi teknis, mengundang partisipasi lembaga internasional, dan memanfaatkan platform digital dalam menyebarkan pesan-pesan strategisnya. (Henrikson, 2006).

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan diplomasi publik milik Mark Leonard sebagai landasan teoritis dalam penulisan penelitian dan melihat bagaimana diplomasi publik menjadi strategi Jepang dalam menghadapi kritik dari Tiongkok dan Korea Selatan. Leonard mendefinisikan diplomasi publik adalah bentuk transformasi dari diplomasi tradisional yang sebelumnya lebih bersifat tertutup dan terbatas pada hubungan antar pemerintah. Istilah ini berkembang seiring dengan meningkatnya pengaruh masyarakat sipil, media global, dan organisasi non-negara

dalam dinamika hubungan internasional.(Leonard, 2002). Penulis akan melihat bentuk kebijakan diplomasi publik Jepang dalam 3 dimensi diplomasi publik Mark Leonard yaitu 1). Manajemen Berita (*News Management*), 2). Komunikasi Strategis (*Strategic Communication*), dan 3.) Pembangunan Relasi (*Relationship Building*). Penulis juga akan menyoroti bagaimana keterkaitan antara diplomasi publik dan *trust building* berpengaruh dalam memperbaiki hubungan antarnegara. Pada akhirnya, penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi diplomasi publik Jepang dapat mengatasi kritik internasional yang dilontarkan oleh Tiongkok dan Korea Selatan atas kebijakannya dalam pembuangan limbah nuklir ke Samudera Pasifik serta memperbaiki citra nasional Jepang di kawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami berbagai macam fenomena secara deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Penelitian di artikel ini akan berfokus pada strategi diplomasi publik Jepang dalam menghadapi kritik Tiongkok dan Korea Selatan terkait kebijakan pembuangan limbah nuklir ke laut Pasifik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, yang mencakup pernyataan resmi pemerintah Jepang, laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), siaran pers lembaga nasional Korea Selatan dan Tiongkok, serta laporan dari media internasional kredibel seperti *The Japan Times*, *The Korea Times*, dan *Reuters*. Selain itu, digunakan pula artikel ilmiah yang membahas seputar diplomasi publik dan hubungan antarnegara.

Hasil dan Pembahasan

Jepang, sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah Pasifik, memiliki hubungan historis dan geografis yang erat dengan lautan. Sebagai negara maju dengan teknologi kelautan dan energi yang berkembang pesat, Jepang sangat bergantung pada sumber daya laut baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Laut Jepang juga merupakan jalur penting bagi perdagangan dan perikanan internasional. Namun, setelah 1 dekade bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011, Jepang menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah nuklir yang dihasilkan.

Dalam pernyataan TEPCO (*Tokyo Electric Power*) sebagai penanggung

jawab aktivitas di PLTN Fukushima Daiichi, pembuangan limbah ini dilakukan karena tempat penyimpanan air limbah radioaktif sudah mencapai ambang batas, dan harus segera dilaksanakan dengan pertimbangan panjang terkait dampaknya pada ekosistem laut.(TEPCO, 2021), Tahun 2021, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga secara resmi menyatakan bahwa rencana pembuangan 1 juta ton limbah radioaktif PLTN *Fukushima Daiichi* akan dibuang ke laut pasifik secara bertahap dan akan dilaksanakan pada kuartal kedua tahun 2023.(Reuters, 2022). Pemerintah Jepang menyatakan bahwa keputusan ini merupakan keputusan paling realistis dan tidak terhindarkan dalam tujuan pemulihan total kawasan *Fukushima Daiichi* setelah bencana gempa dan tsunami yang menghancurkan Jepang tahun 2011 silam. Pembuangan limbah radioaktif ini akan dilakukan secara bertahap selama 20-30 tahun kedepan.(McCurry, 2021b). Kemudian, pemerintah Jepang dan TEPCO memberikan pernyataan pers tentang sebenarnya limbah radioaktif seperti apa yang dibuang dan menjawab kekhawatiran berbagai kalangan khususnya pemerhati lingkungan, terkait proses pengolahan limbah itu sebelum dibuang ke laut pasifik. Dalam pernyataan resmi TEPCO, limbah radioaktif *Fukushima Daiichi* akan diolah dalam waktu yang lama dengan proses yang disebut ALPS atau *Advance Liquid Process System* yang merupakan proses pengolahan limbah melalui reduksi isotop tritium yang ada di dalam kandungan air radioaktif.(Reuters, 2022). Singkatnya, proses ini ditujukan untuk mengurangi sebagian besar kadar isotop tritium dalam air limbah radioaktif tersebut hingga berada pada level aman dan sesuai regulasi internasional. Selanjutnya, air hasil ALPS inilah yang akan dibuang secara bertahap ke Samudera Pasifik melalui pengawasan ketat TEPCO, pemerintah Jepang dan IAEA (*International Atom Energy Agency*).

Hasilnya, pada bulan September 2023, pemerintah Jepang memulai fase pertama untuk mulai membuang limbah air olahan dari PLTN Fukushima ke Samudera Pasifik. Di fase pertama ini, TEPCO membuang sekitar 7,788 ton air hasil olahan limbah radioaktif. Jumlah ini merupakan 0,6% dari total jumlah yang akan dibuang pada fase pertama yaitu sekitar 1.34 juta ton air hasil ALPS. Fase pertama ini akan berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun mulai dari Agustus 2023 hingga Agustus 2024.(EFE, 2023). Setelahnya, pemerintah Jepang,

IAEA dan TEPCO melakukan pemantauan lanjutan dan melihat bagaimana intensitas kandungan isotop tritium di air hasil olahan yang sudah dibuang. Dari hasil pemantauan ini, dilaporkan bahwa kadar konsentrasi isotop tritium dalam air yang telah diolah melalui ALPS dikonfirmasi berada jauh di bawah batas operasional 1.500 *becquerel per liter* (Bq/l) yang ditetapkan oleh Jepang dan jumlah ini jauh lebih rendah daripada standar regulasi Jepang sebesar 60.000 (Bq/l). (Fadilah, 2023). Hasil laporan positif ini membuat Jepang cukup yakin terhadap apa yang sedang mereka lakukan, walaupun bersamaan dengan hasil ini kritik keras dari negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea Selatan semakin keras.

A. Awal Mula Kritik dan Respon Awal Jepang

Sejak rencana pembuangan limbah radioaktif PLTN *Fukushima Daiichi* ke Samudera Pasifik diumumkan oleh pemerintah Jepang dan TEPCO, negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan sudah melontarkan berbagai kritik keras terkait ancaman kerusakan ekologis dan dampak berkepanjangan di sektor maritim lainnya. Bukan hanya pemerintah saja yang bereaksi, namun masyarakat dan organisasi lingkungan pun bersuara tegas atas inisiatif pemerintah Jepang tersebut. Komunitas di kedua negara tersebut bersuara bahwa laut pasifik bukan “tempat sampah” milik Jepang, dan menuntut Jepang untuk dibatalkannya rencana tersebut.

Tiongkok dan Korea Selatan menilai bahwa keputusan Jepang dalam membuang air olahan limbah radioaktif ke laut merupakan hal yang tidak bertanggung jawab dan egois, mereka menilai bahwa laut merupakan hak seluruh manusia dan Jepang seharusnya tidak mempertimbangkan keputusan tersebut untuk dilaksanakan. Tiongkok mengambil langkah tegas dengan memanggil duta besar Jepang untuk Tiongkok, Tarumi Hideo. Pemanggilan ini terkait rencana pemerintah Jepang yang akan membuang air hasil olahan limbah radioaktif ke laut. Tiongkok menyatakan bahwa Jepang harus mengkaji ulang dampak dari pembuangan air olahan limbah radioaktif ke laut, Tiongkok mendesak Jepang untuk membentuk kerangka kerjasama dengan ahli nuklir dari negara tetangga dibawah lembaga internasional agar proses ALPS dapat diawasi secara ketat dan transparan dibawah kendali dan pengawasan internasional. (Xinhua, 2021).

Selanjutnya, melalui Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, Tiongkok menyatakan dengan tegas bahwa tindakan egois Jepang dapat menyebabkan bencana baru yang akan berdampak pada komunitas lokal dan

internasional.(Shalvey & Trotter, 2023). Selain itu, Tiongkok mengambil langkah tegas dengan menutup akses secara total terhadap impor hasil laut Jepang dalam kurun waktu yang lama.(Aulia, 2023). Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar produk hasil laut yang sampai di Tiongkok tidak mengandung kadar radiaktif yang berbahaya jika dikonsumsi. Respon serupa juga dilontarkan oleh pemerintah Korea Selatan melalui Koo Yoon-cheol, Kepala Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah. Koo Yoon-cheol menyampaikan kepada media bahwa keputusan Jepang yang akan membuang jutaan ton air olahan limbah radioaktif ke laut Pasifik adalah keputusan yang terlampaui salah dan tidak bisa diterima dengan cara apapun. Koo Yoon-cheol menambahkan kalau DPR, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan dewan-dewan setempat semuanya menentang keputusan tersebut., begitu juga serikat pekerja perikanan, pakar maritim, dan opini publik di Jepang juga menentang langkah tersebut.(Ko Jun-tae, 2021).

Sikap ini ditunjukkan untuk mewakili kekhawatiran masyarakat Korea Selatan dan menjaga keamanan pangan dan ekologis di kawasan maritim Korea Selatan. Selanjutnya, Korea Selatan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai komunitas internasional dalam menjaga impor hasil laut dari Jepang, yang mana jauh sebelum keributan ini terjadi, Korea Selatan sudah melarang impor hasil laut dari 8 prefektur di Jepang yang berlokasi di dekat PLTN *Fukushima Daiichi* sejak tahun 2013 silam.(BBC, 2013). Dalam pernyataan pers Kementerian Lingkungan Korea Selatan, pemerintah menyatakan bahwa sudah mengambil kebijakan pencegahan terkait rencana Jepang. Keputusan itu antara lain mengamankan perairan laut telah memperluas titik pemantauan tritium dari 53 menjadi 71 sejak tahun lalu, dan frekuensi pengambilan sampel air laut dari enam titik di mana air laut mengalir juga meningkat menjadi empat kali dari satu kali per tahun untuk analisis. Lalu, pemerintah Korea Selatan juga meningkatkan akurasi inspeksi produk perikanan impor dengan memperpanjang waktu deteksi dari 1.800 detik menjadi 10.000 detik, dan kini kami dapat mendeteksi bahan radioaktif di air laut dalam dua hari saja, yang sebelumnya membutuhkan lebih dari 20 hari, berkat pengembangan teknologi deteksi radioaktivitas air laut yang sepuluh kali lebih cepat dan mengidentifikasi langkah-langkah bersama dengan komunitas internasional untuk menarik perhatian dunia melalui organisasi internasional terkait seperti IAEA dan WTO, serta untuk memverifikasi seluruh proses pengolahan air

terkontaminasi dan secara tegas pemerintah tidak akan menerima langkah-langkah yang dapat membahayakan keselamatan rakyat Korea Selatan.(Ministry of Environment., 2021). Sikap ini diambil sebagai antisipasi awal dan bentuk ekspresi pemerintah Korea Selatan dalam melindungi masyarakat Korea Selatan. Bukan hanya dari pemerintah dan institusi negara, lontaran protes juga berasal dari berbagai komunitas pemerhati lingkungan dan juga masyarakat lokal dari kedua negara. Hal ini berkaitan dengan peran laut sebagai penyedia kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat, ditambah Tiongkok dan Korea Selatan yang merupakan merupakan negara yang sangat bergantung pada sektor maritim.

Pernyataan PM Jepang seputar pembuangan limbah radioaktif ke laut yang kontroversial memicu beragam protes di penjuru Tiongkok. Setelah rencana ini disiarkan, masyarakat Tiongkok mendesak adanya sikap yang bertanggung jawab terkait keputusan Jepang, masyarakat menilai keputusan ini adalah hal yang sangat egois dan tidak etis terhadap keberlangsungan lingkungan laut.(Cai, 2023). Berbagai macam demonstrasi bahkan hingga sentimen ”anti-Jepang” pun meluas di berbagai penjuru negeri. Puncaknya, pada tahun 2023 masyarakat Tiongkok menggeruduk dan melempari sekolah Jepang di daerah Suzhuo, Provinsi Jiangsu dengan telur, parahnya lagi sebuah sekolah Jepang di daerah Qingdao, Provinsi Shandong dilempari batu dan mengakibatkan beberapa siswa dan tenaga pendidik terluka.(Rayadi, 2023).

Sikap ini pun menuai tanggapan keras dari Kedutaan Besar Jepang untuk Tiongkok, Dubes Jepang mengatakan bahwa aksi tersebut bisa merugikan pelaku dan berdampak pada ketertiban lingkungan masyarakat.Selain publik Tiongkok, publik Korea Selatan juga melakukan rangkaian demonstrasi untuk menolak rencana Jepang membuang limbah radioaktif ke laut Pasifik. Warga Korea Selatan melakukan unjuk rasa di jalanan Seoul, menuntut pemerintah Jepang menarik kembali rencana pembuangan limbah radioaktif ke laut pasifik. Para nelayan, aktivis lingkungan dan masyarakat lokal berseru menolak rencana itu dan menegaskan kepada Jepang untuk ”Simpan saja limbah itu di darat, jangan buang ke laut.”(Xinhua, 2023). Kim Min-kyung, salah satu pengunjuk rasa mengatakan ”Laut bukan milik Jepang saja, tetapi milik kita semua. Meski demikian, (Jepang) akan membuangnya tanpa persetujuan atau kesepakatan dari negara-negara tetangga. Saya rasa tindakan itu keterlaluan karena tidak ada yang tahu bagaimana

air limbah tersebut akan memengaruhi negara kita dan negara-negara tetangga lain.”(Antara, 2023).

Berbagai bentuk ketidaksetujuan ini pun membuat Jepang menjadi semakin terpojok dan harus mencari jalan keluar terkait masalah ini. Bukan hanya untuk melegitimasi rencana pembuangan air olahan limbah radioaktif ini, namun juga mengembalikan kepercayaan publik internasional terhadap Jepang yang sudah tercoreng akibat banyaknya kritik internasional kepada mereka. Dalam meredam berbagai kritik ini, Jepang menggandeng IAEA sebagai Lembaga internasional untuk memberikan legitimasi secara saintifik, yang menyajikan bahwa air hasil ALPS sudah aman dan sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Jepang juga menyatakan bahwa sebelum dan setelah pembuangan, IAEA dan TEPCO melakukan pemantauan terhadap kandungan isotop tritium yang ada di dalam air hasil olahan agar berada di bawah standar internasional.(IAEA, 2024).

Jepang juga aktif menyuarakan narasi kalau yang dibuang bukanlah limbah radioaktif, melainkan air hasil olahan. Nomenklatur ini dipilih untuk membingkai keputusan Jepang bahwa mereka tidak serta merta membuang limbah radioaktif ke laut pasifik tanpa proses pengolahan. Narasi ini selalu digunakan dalam penyampaian resmi pemerintah Jepang untuk memberikan penguatan bahwa Jepang tidak membuang limbah radioaktif melainkan limbah yang sudah melalui proses yang menghilangkan kadar berbahaya dalam air tersebut (Radwaste Solutions, 2023).

B. Upaya Diplomasi Publik Jepang

Melalui berbagai upaya dan konsolidasi dengan pemerintah Tiongkok dan Korea Selatan, Jepang mendapatkan respon positif dan terbuka dari pemimpin negara tetangga. Dalam pertemuan terbatas pertama pada Maret 2024, Jepang diwakili oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, Ekonomi dan Perdagangan, serta Otoritas Regulasi Nuklir dan operator pembangkit listrik *Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.* (TEPCO) dan Tiongkok diwakili oleh pakar dari organisasi riset.(VOA News, 2024).

Dialog ini berisi pembahasan tentang keinginan pemerintah Jepang untuk segera membuang limbah air radioaktif yang sudah diolah melalui proses ALPS. Selanjutnya, November 2024 Xi Jinping dan Fumio Kishida melakukan pertemuan kembali untuk mengambil langkah solutif untuk menyelesaikan masalah tersebut, Hasilnya, Jepang dan Tiongkok mencapai kesepakatan bahwa Jepang akan membentuk

mekanisme pemantauan internasional di bawah kerangka IAEA, yang memungkinkan Tiongkok dan pihak lain melakukan pengambilan sampel serta pemantauan independen.(YAMAGUCHI & BODEEN, 2024). Dengan mengedepankan bukti riset dan data pemantauan berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa konsentrasi kandungan radioaktif, khususnya tritium, tetap berada di bawah batas keamanan internasional yang diterima, baik dalam air laut maupun sampel kehidupan laut..

IAEA sebelumnya telah menegaskan bahwa rencana pelepasan Jepang memenuhi standar keamanan global, meskipun Tiongkok terus menekankan bahwa persetujuan IAEA tidak boleh diartikan sebagai validasi tanpa syarat atas tindakan Jepang. Secara politik, kesepakatan ini memungkinkan kedua negara untuk saling menguntungkan dengan Jepang dapat melanjutkan rencana pembuangan jangka panjangnya dengan legitimasi tambahan, sementara Tiongkok memperoleh peran dalam proses pengawasan, mencerminkan penekanannya pada akuntabilitas lingkungan.(Reuters, 2024).

Hasil dari konsensus itu juga membuat Tiongkok menarik kebijakannya dalam menutup impor hasil laut dari Jepang. Hal ini diambil setelah Jepang berkomitmen untuk melakukan pemantauan secara berkala di wilayah laut sekitar Jepang yang menjadi wilayah komoditas hasil laut.(WNN, 2024). Dalam konsensus ini juga, memberikan akses penuh kepada Tiongkok untuk menjadi bagian dari tim pemantauan ALPS di PLTN *Fukushima Daiichi*.

Jepang juga berhasil mencapai kesepakatan jangka panjang dengan pihak Korea Selatan. Kesepakatan ini adalah wujud kesuksesan Jepang dalam memberikan legitimasi internasional dan transparansi proses ALPS di PLTN *Fukushima Daiichi*. Kesepakatan ini diperoleh dari hasil pertemuan antara Jepang dan Korea Selatan terkait keputusan pembuangan limbah nuklir ke laut Pasifik. Pada pertemuan tersebut, pihak Korea Selatan menginginkan adanya penyelesaian kasus melalui pendekatan yang teknis dan diplomatis, hal ini ditujukan mengingat kondisi skeptis publik Korea Selatan terhadap keputusan ini dan dari pihak Jepang mengundang ahli dan akademisi di bidang ekologi, lingkungan, maritim dan nuklir untuk menjadi tim pemantauan internasional dibawah kerangka kerja IAEA.. Hasilnya, konsensus tersebut akan berfokus pada mekanisme pemantauan, transparansi, dan komunikasi bilateral. Salah satu komponen kunci dari kesepakatan tersebut adalah penerimaan Jepang terhadap keterlibatan IAEA dalam proses pengawasan, termasuk inspeksi rutin dan tinjauan data. Meskipun Korea

Selatan awalnya berupaya menempatkan ahli-ahli mereka secara permanen di lokasi Fukushima, kedua belah pihak akhirnya sepakat bahwa ahli-ahli Korea Selatan akan berpartisipasi dalam aktivitas pemantauan di bawah regulasi internasional dan kerangka kerja IAEA.(Maresca, 2023).

Kesimpulan

Kebijakan Jepang untuk membuang limbah air radioaktif yang telah diolah dari PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik setelah bencana nuklir 2011 telah memicu berbagai tanggapan internasional, terutama dari negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut telah menyampaikan kritik tajam, tidak hanya berdasarkan kekhawatiran teknis dan ilmiah terkait potensi pencemaran lingkungan laut dan risiko terhadap kesehatan manusia, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketegangan politik historis dan ketidakpercayaan publik yang telah lama ada.

Sebagai tanggapan atas hal ini, Jepang tidak hanya mengandalkan pendekatan teknokratis dan kerja sama dengan lembaga internasional seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA), tetapi juga secara sistematis mengadopsi strategi diplomasi publik. Menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Mark Leonard, diplomasi publik Jepang dilaksanakan melalui tiga tahap utama: manajemen berita, komunikasi strategis, dan pembentukan hubungan. Pada tahap pengelolaan berita, Jepang mengemas narasi kebijakan pembuangan limbah nuklirnya sebagai langkah ilmiah dan bertanggung jawab melalui berbagai saluran resmi, termasuk media digital dan siaran pers pemerintah. Pada tahap komunikasi strategis, Jepang memperkuat kampanye informasi publik globalnya untuk membangun persepsi positif, termasuk dengan memberikan akses kepada media internasional dan akademisi ke fasilitas ALPS di Fukushima. Sementara itu, pada tahap pembentukan hubungan, Jepang melibatkan aktor dari negara-negara kunci untuk membangun dialog teknis dan diplomatik, yang berujung pada pembentukan mekanisme pemantauan bersama di bawah kerangka kerja IAEA.

Hasil dari strategi ini menunjukkan bahwa Jepang secara bertahap berhasil mengurangi ketegangan diplomatik dan memulihkan kepercayaan publik internasional. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa diplomasi publik, jika dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan prinsip transparansi serta partisipasi multilateral, dapat

memainkan peran kunci dalam memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri dan mengurangi dampak negatif terhadap reputasi suatu negara di tengah tekanan geopolitik yang dinamis dan opini publik internasional.

Referensi

- Antara. (2023, August 14). *Warga Korsel unjuk rasa tentang pembuangan limbah radioaktif ke laut*. <https://www.antaraneWS.com/Berita/3679851/Warga-Korsel-Unjuk-Rasa-Tentang-Pembuangan-Limbah-Radioaktif-Ke-Laut>.
- Aulia, L. (2023, August 25). *After Fukushima Waste Disposal, China Stops Importing Sea Products from Japan*. <https://www.kompas.id/artikel/en-paska-pembuangan-limbah-fukushima-china-stop-impor-hasil-laut-dari-jepang>.
- Azizah, M., Fatinah, D., Sari, I. F., Andriani, N. P., Veronica, O. A., & Sharapova, T. (2024). Pertanggungjawaban Jepang terhadap Pembuangan Air Limbah Nuklir: Pelanggaran Hukum Lingkungan Internasional Mengancam Lingkungan Global. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 03(02), 153–165.
- BBC. (2013, September 6). *South Korea bans fisheries imports from Fukushima area*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-23968282>.
- Cai, D. (2023, September 3). *Fukushima: China's anger at Japan is fuelled by disinformation*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-66667291>.
- CNN Indonesia. (2023, August 24). *China Larang Impor Seafood Jepang Imbas Buang Limbah Nuklir Fukushima*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230824140434-92-989987/China-Larang-Impor-Seafood-Jepang-Imbas-Buang-Limbah-Nuklir-Fukushima>.
- EFE. (2023, November 11). *First phase of Fukushima wastewater discharge concludes*. <https://efe.com/en/latest-news/2023-09-11/First-Phase-of-Fukushima-Wastewater-Discharge-Concludes/>.
- Fadilah, B. (2023, October 13). *Jepang Kehabisan Ruang Penyimpanan Limbah Nuklir: Laut Solusinya*. <https://zonaebt.com/jepang-kehabisan-ruang-penyimpanan-limbah-nuklir-laut-solusinya/>.
- Fukushima Update. (2021). *The plan, the science and the safety: Discharging ALPS treated water*. https://fukushima-updates.reconstruction.go.jp/en/condition/archive/article002.html?utm_source=chatgpt.com.
- Han Joo, Ki. (2023, July 5). *S. Korea respects IAEA report on Fukushima wastewater discharge: official*. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20230705004100315?>
- Henrikson, A. K. (2006). What Can Public Diplomacy Achieve? *Discussions Paper in Diplomacy*.
- Hyun-woo, N. (2023, August 27). *Korean sentiment on Fukushima wastewater release worsens*. <https://www.koreatimes.co.kr/Southkorea/Environment-Animals/20230827/Korean-Sentiment-on-Fukushima-Wastewater-Release-Worsens>.
- IAEA. (2023, July 4). *IAEA Finds Japan's Plans to Release Treated Water into the Sea at Fukushima Consistent with International Safety Standards*. <https://www.iaea.org/Newscenter/Pressreleases/iaea-finds-japans-plans-to-release-treated-water-into-the-sea-at-fukushima-consistent-with-international-safety-standards>.

- IAEA. (2024, October 18). *Tritium Level Far Below Japan's Operational Limit in Tenth Batch of ALPS Treated Water, IAEA Confirms*.
<https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/tritium-level-far-below-japans-operational-limit-in-tenth-batch-of-alps-treated-water-iaea-confirms>.
- Ko Jun-tae. (2021, April 13). *Korea condemns Japan's decision to release water from Fukushima*.
<https://m.koreaherald.com/article/2594921#:~:text=Korea%20condemns%20Japan's%20decision%20to,Business>.
- Leonard, M. (2002). *Public Diplomacy* (First). The Foreign Policy Centre.
- Liang, X., Yang, S., Lou, Z., & Ali, A. (2024). The Impact of Japan's Discharge of Nuclear-Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade, and Food Security in China and Japan. *Sustainability*, 16(3), 1285.
<https://doi.org/10.3390/su16031285>
- Maresca, T. (2023, July 7). *South Korea co-signs Japan's Fukushima radioactive water release plan*. https://www.upi.com/Top_News/World-News/2023/07/07/Fukushima-Radioactive-Water-Discharge-IAEA-Grossi/8561688716555/
- McCurry, J. (2021a, April 13). *Fukushima: Japan announces it will dump contaminated water into sea*.
<https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/13/fukushima-japan-to-start-dumping-contaminated-water-pacific-ocean>.
- McCurry, J. (2021b, April 13). *Fukushima: Japan announces it will dump contaminated water into sea*.
<https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/13/fukushima-japan-to-start-dumping-contaminated-water-pacific-ocean>.
- Ministry of Environment. (2021, April 13). *The Korean Government's Statement on Japan's Decision to Release Waste Water from Fukushima into the Ocean*.
https://www.me.go.kr/eng/web/board/read.do;jsessionid=jyQtDOOzOqZUri9wI9K_L1mZ7YdzMH7a1B5nMzVC.Mehome1?PagerOffset=60&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=461&orgCd=&boardMasterId=522&boardCategoryId=&boardId=1457370&decorator=.
- Radwaste Solutions. (2023, July 6). *Beyond the headlines: Japan's treatment and release of Fukushima wastewater*. <https://www.ans.org/news/article-5152/beyond-the-headlines-japans-treatment-and-release-of-fukushima-wastewater/>.
- Rayadi, M. P. (2023, August 29). *Jepang-China Memanas Buntut Buang Limbah Nuklir ke Laut*. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-017053855/jepang-china-memanas-buntut-buang-limbah-nuklir-ke-laut-warga-diteror-hingga-sekolah-dilempari-batu>.
- Reuters. (2022, May 19). *(OFFICIAL) UPDATE 1 Fukushima water release plan gets initial OK from Japan regulator*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-nuclear-regulator-grants-initial-nod-fukushima-water-release-plan-2022-05-18/>.
- Reuters. (2024, September 20). *China, Japan reached agreement in August on Fukushima water discharge*. <https://apnews.com/article/china-japan-nuclear-power-plant-fukushima-water-19600195a57db01cad0ef8b619ca13e5>.
- Ryall, J. (2020, October 20). *Fukushima water release plan provokes furious reaction*. <https://www.dw.com/en/tepcu-fukushima-contaminated-water/a-55334567>.
- Shalvey, K., & Trotter, A. (2023, August 24). *Japan begins releasing Fukushima's*

treated radioactive water into Pacific, prompting strong rebuke from China.

<https://abcnews.go.com/International/Japan-Begins-Releasing-Treated-Fukushima-Water-Pacific/Story?Id=102523576>.

Sitty Maisyaro Kalauw, N. N. (2025). Kerja Sama Indonesia–Korea melalui Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terhadap Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020–2023. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2046-2057.

TEPCO. (2021, January 19). *How is “radioactive waste” disposed of at the end?*.

https://www.tepco.co.jp/en/hd/decommission/towards_decommissioning/things_you_should_know_more_about_decommissioning/answer-23-e.html.

VOA News. (2024, March 31). *Japan, China experts discuss concerns over discharge of treated radioactive water*. <https://www.voanews.com/a/Japan-China-Experts-Discuss-Concerns-over-Discharge-of-Treated-Radioactive-Water-/7550807.html>.

WNN. (2024, September 20). *China-Japan accord on monitoring of Fukushima water releases*. <https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-Japan-Accord-on-Monitoring-of-Fukushima-Water-Releases>.

Xinhua. (2021, April 16). *China summons Japanese ambassador to lodge representations over Japan’s decision to dump nuclear wastewater*.

<https://en.people.cn/N3/2021/0416/C90000-9839772.html#:~:Text=China%20summons%20Japanese%20ambassador%20to,Nuclear%20wastewater%20%2D%20People’s%20Daily%20Online>.

Xinhua. (2023, August 5). *South Koreans protest Japanese PM’s visit to Seoul*. Df030a94dfce4d9caa0c6c71f9eda8dd.

YAMAGUCHI, M., & BODEEN, C. (2024, September 21). *Japan and China reach deal over Fukushima water release and move closer to resolving seafood ban*. <https://apnews.com/Article/China-Japan-Nuclear-Power-Plant-Fukushima-Water-19600195a57db01cad0ef8b619ca13e5>.

Zakiah, S. (2023, August 24). *Tiongkok Protes Keras Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut*. <https://www.metrotvnews.com/play/BmRCmaAe-Tiongkok-Protes-Keras-Rencana-Jepang-Buang-Limbah-Nuklir-Ke-Laut>.